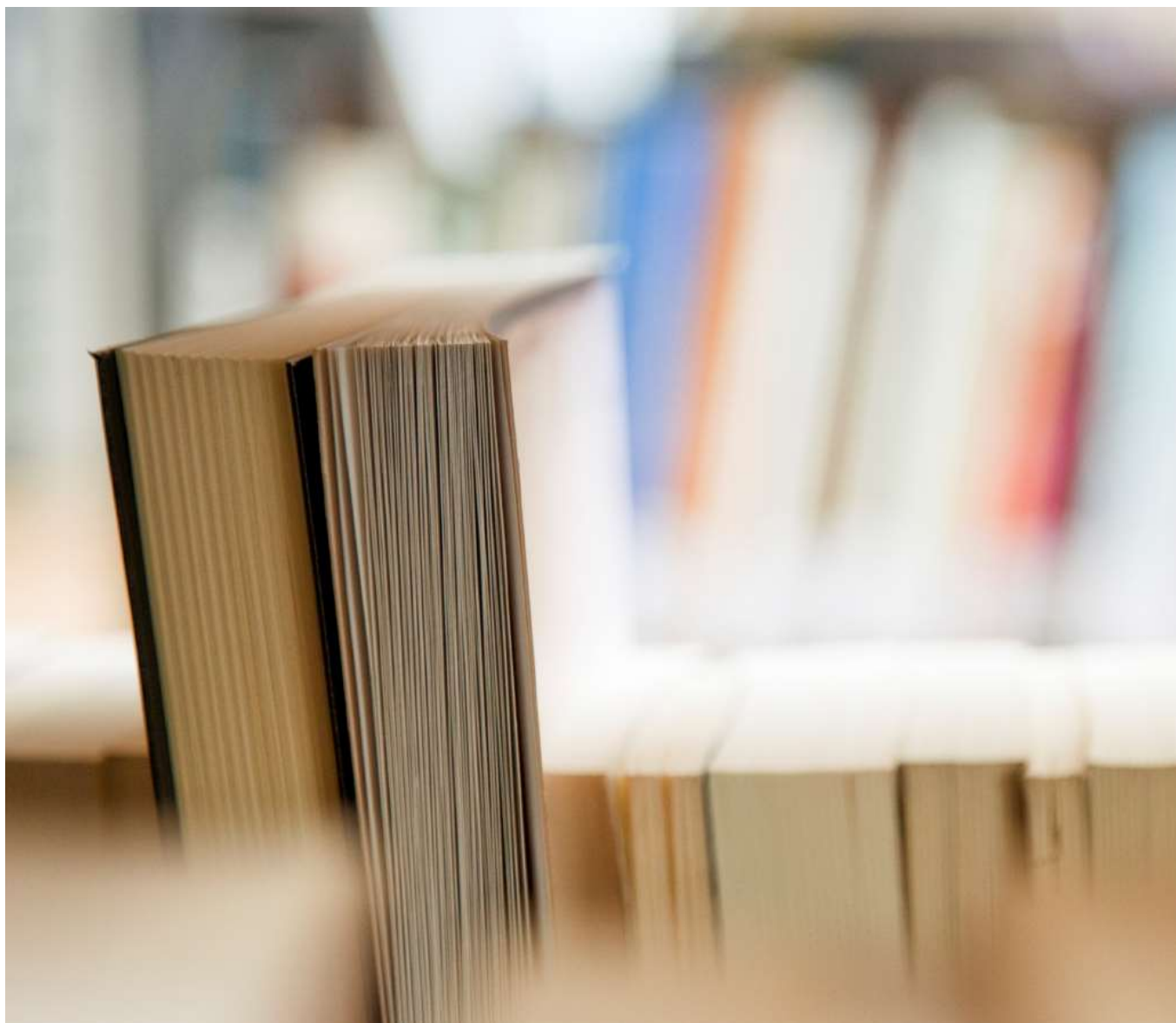




LAPORAN KINERJA 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana didalamnya termuat tata cara penyusunan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026. Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rencana kerja pembangunan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.

Sei Rampah,

2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

MUHAMMAD WAHYUDHI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	3
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
1.2.2 Anggaran	6
1.3 Dasar Hukum	7
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	10
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	15
2.3 Perjanjian Kinerja 2024.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1 Capaian Kinerja	23
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	24
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	25
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	46

3.1.4	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	47
3.1.5	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	48
3.1.6	Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan	49
3.1.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	51
3.1.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	53
3.2	Realisasi Anggaran.....	55
BAB IV PENUTUP		59
LAMPIRAN		62

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pencapaian Kinerja Sasaran Satuan Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024	25
Tabel 3. 2 Rekapitulasi Penanganan Gangguan Trantibum	27
Tabel 3. 3 Rekapitulasi Penegakan Perda Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024	31
Tabel 3. 4 Rekapitulasi Perda/ Perkada di Kabupaten Serdang Bedagai Pada Tahun 2024	34
Tabel 3. 5 Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024	36
Tabel 3. 6 Rekapitulasi Penyelamatan non Kebakaran Tahun 2024	41
Tabel 3. 7 Capaian Nilai Sakip Satpol PP Tahun 2024.....	44
Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024	45
Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Kinerja	46
Tabel 3. 10 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	47
Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota	48
Tabel 3. 12 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	50
Tabel 3. 13 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	52
Tabel 3. 14 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan....	54
Tabel 3. 15 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TA. 2024..... 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi Masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LK). Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024, maka disusunlah Laporan Kinerja (LK) Satuan Polisi Pamong Praja yang berupa informasi mengenai sasaran RPJMD dan realisasi pencapaian sasaran dengan disertai penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian sasaran kinerja sesuai dengan perubahan RPJMD yang telah disesuaikan dengan kondisi daerah. Dengan demikian,

Laporan Kinerja (LK) sebagai bagian dari dokumen SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2024 menjadi laporan kemajuan dan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target pada tahun ketiga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.

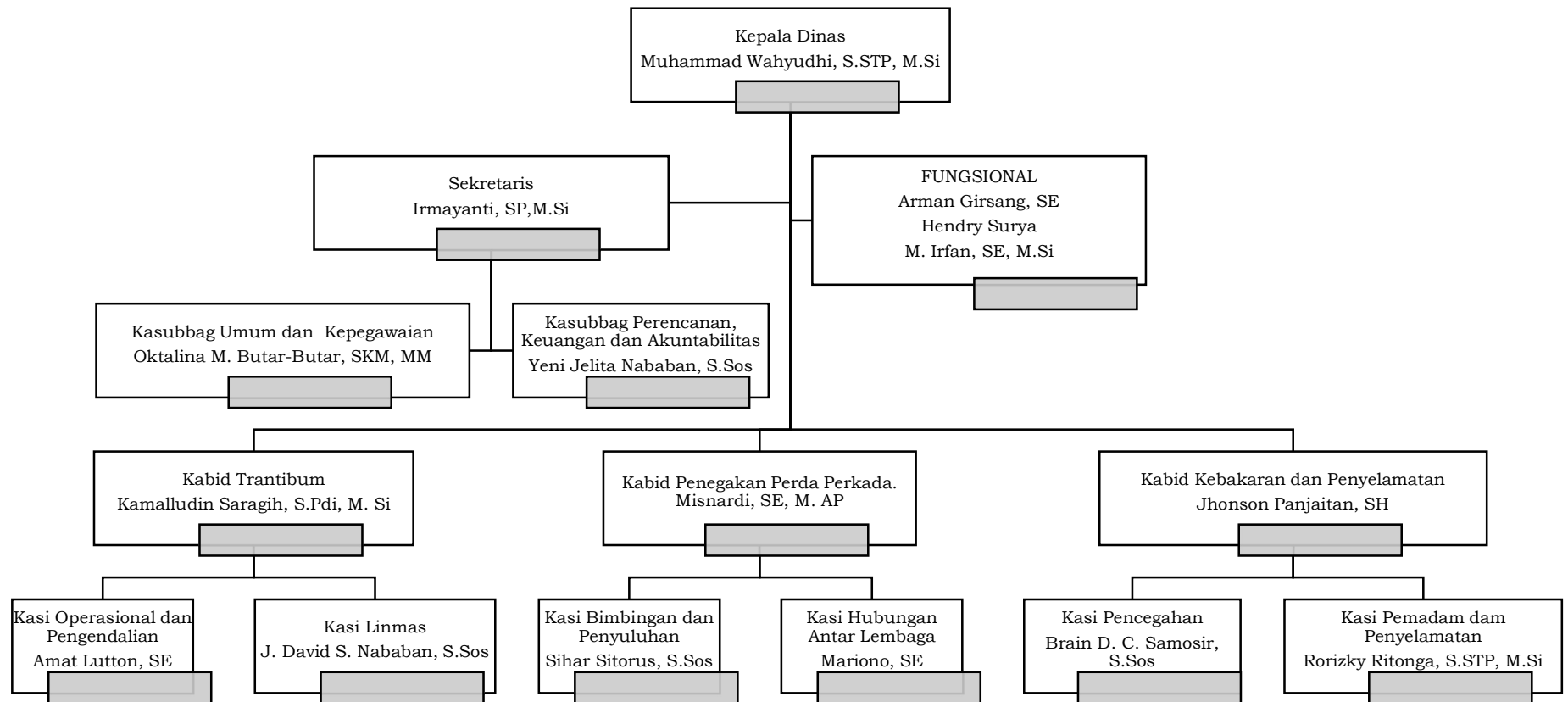
1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari:

1. Kepala Satuan, membawahi :
2. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahi :
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 2) Seksi Perlindungan Masyarakat
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan
 - 2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi :
 - 1) Seksi Pencegahan
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TA. 2024



Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Sebagai Satuan yang berbentuk dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Memiliki tugas dan kewajiban dalam hal Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Hal inilah yang menjadi acuan kerja bagi pelaksanaan tugas kedinasan dalam pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai wewenang menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah yang sudah tentu harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang disiplin, memiliki kinerja yang baik serta berwibawa, mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Bupati Kabupaten Serdang Bedagai dalam menegakkan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut adapun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai berpegang pada Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab III Pasal 6, dimana Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, dan sub urusan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sub urusan kebakaran, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dengan aparat kepolisian, aparat perangkat daerah, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau aparat lainnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat untuk dapat mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- f. pemberdayaan sumber daya manusia anggota satuan polisi pamong praja, dan pemadam kebakaran dalam peningkatan disiplin dan profesionalisme di bidang tugasnya masing-masing; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sub urusan kebakaran.

1.2.2 Anggaran

Pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi dalam urusan Ketentraman dan Keteritban Umum diberikan anggaran sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)
(1)	(2)	(3)
APBD	Rp. 8.763.018.563	Rp. 9.726.870.546,-
Sumber Lainnya (Jika Ada)	Rp. -	Rp. -

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Evalausi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024.
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.
18. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan Latar Belakang, Penjelasan Umum, Dasar Hukum dan Sistematika Laporan Kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah,,Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja, Skala Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran,

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 6 (enam) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Tujuan Dan Sasaran Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI AKHIR 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif	Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum			NA	NA	0.9	0.9	1	1
			Meningkatnya kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	90	95	98	100
2.			Peningkatan Pelayanan pemadam kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran Dan Non Kebakaran	100	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Satpol PP 2021-2026

Kemudian dari tujuan dan sasaran yang telah disusun tersebut, maka dapat diturunkan Indikator Kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dengan rumusan dan formula sebagaimana tercantum didalam tabel berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
A.	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat daalm rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum	Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum dapat didefinisikan sebagai indikator yang menggambarkan tingkat keamanan dan ketertiban dalam suatu wilayah berdasarkan berbagai variabel yang relevan. Definisi operasional ini mencakup langkah-langkah spesifik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menghitung nilai indeks yang mencerminkan tingkat keamanan dan ketertiban umum seperti persentase tingkat gangguan trantibum, kenyamanan lingkungan, tingkat pelayanan masyarakat baik trantibum maupun pemadam kebakaran	50 % (Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantbum) + 50% (Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran)	Satpol PP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat didefinisikan sebagai persentase atau proporsi dari standar tertentu yang telah ditetapkan yang berhasil dipenuhi dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dalam suatu wilayah, lingkungan, atau organisasi. Ukuran yang dipakai adalah kondisi tertib dan tentram. Langkah yang dipakai untuk mengukur adalah dengan mengukur persentase kejadian pelanggaran trantibum yang ditangani dan penegakan atas perda/ perkara yang memiliki sanksi yang dilanggar baik secara preventif maupun secara represif. Sehingga memungkinkan pemantauan dan pengukuran yang objektif dalam mengukur kondisi tentram dan tertib.	$\frac{(\text{Persentase Penanganan Gangguan Trantibum} + \text{Persentase Penegakan Perda yang ditangani})}{2}$	Bidang Trantibum dan Penegakan Perda/ Perkada

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
2.	Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran dapat didefinisikan sebagai persentase atau proporsi dari standar tertentu yang telah ditetapkan yang berhasil dipenuhi dalam memberikan pelayanan oleh unit pemadam kebakaran. Definisi ini mencakup langkah-langkah spesifik yang digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data terkait dengan berbagai aspek yang relevan dengan pelayanan pemadam kebakaran dan non-kebakaran.	<i>(Persentase layanan pemadaman kebakaran di kabupaten + Persentase pelayanan Non kebakaran) / 2</i>	Bidang Kebakaran dan Penyelamatan
3	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip perangkat daerah	Sakip adalah system pengelolaan kinerj instansi pemerintah yang bertujuan untuk menjadikan pemerintah lebih akuntabel, transparan dan berorientasi pada hasil. System ini mencakup Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerj. Pengukuran dilakukn terhadap Perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja	<i>Nilai Sakip = Perencanaan kinerja 30 + Pengukuran kinerja 30 + Pelaporan kinerja 15 + Evaluasi kinerja 25</i>	Inspektorat

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 :

Tabel 2. 3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat daalm rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif		Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum	Poin	0.975
		Meningkatnya kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	95
		Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran	%	100
2	Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip perangkat daerah	Predikat	BB

Sumber : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Setelah terdapat beberapa perbaikan dan menelaah capaian tahun sebelumnya, maka terdapat beberapa perbaikan dalam Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatkan Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum	0.98
1.	Meningkatnya Kualitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95%
2.	Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran dan non Kebakaran	100%
B	Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,99

Sumber : Perjanjian Kinerja Satpol Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.

Tabel 2. 5
Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,99 Nilai
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen
I.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan	100 %
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan
I.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	100 %
I.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
I.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
I.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
I.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik selama setahun	1 Paket

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I.3.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
I.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen
I.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
I.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %
I.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100 %
I.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
I.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
I.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %
I.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
I.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
I.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	67 Unit
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100 %
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	90 %
II.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100 %
II.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	20 Laporan
II.1.2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	73 Laporan
II.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	1 Dokumen
II.1.4	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam	1 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
II.1.5	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kpasitasnyanteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	100 Orang
II.1.6	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan
II.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	90 %
II.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	2 Laporan
II.2.2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan
II.2.3	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Laporan
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan pemadam kebakaran	100 %
		Persentase pelayanan non kebakaran	100 %
		Persentase pembentukan relawan	30 %

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		pemadam kebakaran di desa/ kelurahan	
III.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Bahaya Kebakaran	100 %
III.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Pananggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen
III.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan
III.1.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen
III.1.4	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0 Dokumen
III.1.5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen
III.1.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah	31 Unit

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	
III.1.7	Penyelenggaraan Kerjasama dan koordinasi antar Daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan Analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	2 Orang
III.1.8	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen
III.2	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi yang dilaksanakan	100 %
III.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen
III.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase Pembentukan Relawan di desa/ Kelurahan	30 %
III.3.1	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	60 Orang

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satpol PP Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunan ini berawal dari laporan individu seluruh ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai yang selalu diinput pada aplikasi E-Kinerja Kabupaten Serdang Bedagai, begitu juga untuk pengumpulan informasi kinerja dilakukan setiap minggu melalui dialog kinerja yang melibatkan seluruh ASN dan pimpinan. Hasil capaian kinerja yang telah dihasilkan dalam dialog kinerja diinput pada aplikasi e-Sakip Kabupaten Serdang Bedagai setiap bulannya. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. Informasi dimaksud merupakan bahan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan langkah-langkah kinerja berikutnya.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Terdapat beberapa metode yaitu :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Pengukuran dilakukan dengan cara :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus

$$\text{Persentase pencapaian indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendahnya, digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Pencapaian Kinerja Sasaran
Satuan Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2024

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91.00 - 100
2	Tinggi	76.00 – 90.99
3	Sedang	66.00 – 75.99
4	Rendah	51.00– 65.99
5	Sangat Rendah	0 – 50.99

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun pengukuran kinerja atas indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan dalam uraian berikut :

3.1.2.1 Pengukuran Sasaran Strategis I

	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum
---	---

Pada sasaran strategis yang pertama, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu. Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pada indikator pertama, Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum data yang diambil dari bidang Trantibum dan bidang Penegakan Perda/ Perkada. Adapun formulasi yang dipergunakan untuk mendapatkan kinerja ini yaitu :

Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum =

$$\frac{\text{Persentase Penanganan Gangguan Trantibum} + \text{Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan}}{2}$$

a. Persentase Gangguan Trantibum

Adapun dalam rangka penanganan gangguan trantibum, diperoleh data pelaksanaan penanganan gangguan trantibum mulai dari pencegahan,

pelaksanaan dan deteksi dini terhadap gangguan yang terjadi dikabupaten. Adapun rekapitulasinya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 2
Rekapitulasi Penanganan Gangguan Trantibum
di Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2024

NO	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis pengaduan	Tindak Lanjut	Status Pengaduan
1	PT.SRI RAHAYU AGUNG	10 JANUARI 2024	Unjuk Rasa Damai Sehubungan dengan Belum Dibayarnya upah Pekerja/Buruh PT.SRI RAHAYU AGUNG	Unjuk Rasa Damai Sehubungan dengan Belum Dibayarnya upah Pekerja/Buruh PT.SRI RAHAYU AGUNG	Terlayani
2	PT.SRI RAHAYU AGUNG	16 JANUARI 2024	Unjuk Rasa Damai Sehubungan dengan Belum Dibayarnya upah Pekerja/Buruh PT.SRI RAHAYU AGUNG	Unjuk Rasa Damai Sehubungan dengan Belum Dibayarnya upah Pekerja/Buruh PT.SRI RAHAYU AGUNG	Terlayani
3	PT.SRI RAHAYU AGUNG	05 FEBRUARI 2024	Unjuk Rasa Damai Sehubungan dengan Belum Dibayarnya upah Pekerja/Buruh PT.SRI RAHAYU AGUNG	Unjuk Rasa Damai Sehubungan dengan Belum Dibayarnya upah Pekerja/Buruh PT.SRI RAHAYU AGUNG	Terlayani
4	SEKOLAH	19 FEBRUARI 2024	Anak Sekolah yang Berada di luar saat jam belajar di Kecamatan Sei Bambi	Menghunjuk personil Satpol PP kabupaten serdang bedagai melakukan penertiban dan penindakan terhadap anak sekolah yang berada di luar saat jam belajar di Kec.Sei Bambi	Terlayani
5	(DPC LSM PAKAR) SERDANG BEDAGAI	22 FEBRUARI 2024	Aksi adanya dugaan penggelapan bantuan beras bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai	Satpol PP Melakukan Pengamanan	Terlayani
6	MASYARAKAT	27 FEBRUARI 2024	Adanya ODGJ (orang dalam gangguan jiwa)	Melaksanakan Taksi Cepat dalam penertiban adanya ODGJ (orang dalam gangguan jiwa) di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai	Terlayani

NO	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis pengaduan	Tindak Lanjut	Status Pengaduan
7	SEKOLAH	01 MARET 2024	Anak Sekolah yang Berada di luar saat jam belajar di Kecamatan Teluk Mengkudu	Menghunjuk personil Satpol PP kabupaten serdang bedagai melakukan penertiban dan penindakan terhadap anak sekolah yang berada di luar saat jam belajar di Kec.Teluk Mengkudu	Terlayani
8	SEKOLAH	08 MARET 2024	Anak Sekolah yang Berada di luar saat jam belajar di Kecamatan Sei Bamban	Menghunjuk personil Satpol PP kabupaten serdang bedagai melakukan penertiban dan penindakan terhadap anak sekolah yang berada di luar saat jam belajar di Kec.Sei Bamban	Terlayani
9	SEKOLAH	18 MARET 2024	Anak Sekolah yang Berada di luar saat jam belajar di Kecamatan Teluk Mengkudu	Menghunjuk personil Satpol PP kabupaten serdang bedagai yang berada di luar saat jam belajar di Kec.Teluk Mengkudu	Terlayani
10	SEKOLAH	26 MARET 2024	Anak Sekolah yang Berada di luar saat jam belajar di Kecamatan Sei Bamban	Menghunjuk personil Satpol PP kabupaten serdang bedagai melakukan penertiban dan penindakan terhadap anak sekolah	Terlayani
11	SEKOLAH	15 APRIL 2024	Anak Sekolah yang Berada di luar saat jam belajar di Kecamatan Sei Bamban	Menghunjuk personil Satpol PP kabupaten serdang bedagai melakukan penertiban dan penindakan terhadap anak sekolah yang berada di luar saat jam belajar di Kec.Sei Bamban	Terlayani
12	SEKOLAH	22 APRIL 2024	Anak Sekolah yang Berada di luar saat jam belajar di Kecamatan Sei Rampah	Menghunjuk personil Satpol PP kabupaten serdang bedagai melakukan penertiban dan penindakan terhadap anak sekolah yang berada di luar saat jam belajar di Kec.Sei Rampah	Terlayani
13	SEKOLAH	23 APRIL 2024	Anak Sekolah yang Berada di luar saat jam belajar di Kecamatan Teluk Mengkudu	Menghunjuk personil Satpol PP kabupaten serdang bedagai melakukan penertiban dan penindakan terhadap anak sekolah yang berada di luar saat jam belajar di Kec.Teluk Mengkudu	Terlayani

NO	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis pengaduan	Tindak Lanjut	Status Pengaduan
14	FORUM PERJUANGAN TANAH KOTA GALUH	10 MEI 2024	Menyampaikan Aspirasi dalam memperjuangkan hak atas tanah Desa Kota Galuh dan menyampaikan agar hakim objektif dalam putusan perkara	Satpol PP Melakukan Pengamanan	Terlayani
15	SEKOLAH	13 MEI 2024	Anak Sekolah yang Berada di luar saat jam belajar di Kecamatan Sei Rampah	Menghunjuk personil Satpol PP kabupaten serdang bedagai melakukan penertiban dan penindakan terhadap anak sekolah yang berada di luar saat jam belajar di Kec.Sei Rampah	Terlayani
16	SEKOLAH	04 JUNI 2024	Anak Sekolah yang Berada di luar saat jam belajar di Kecamatan Sei Rampah	Menghunjuk personil Satpol PP kabupaten serdang bedagai melakukan penertiban dan penindakan terhadap anak sekolah yang berada di luar saat jam belajar di Kec.Sei Rampah	Terlayani
17	ALIANSI PEMUDA BANGUN DAERAH SERDANG BEDAGAI (APBD SERGAI)	01 JULI 2024	Aksi Unjuk rasa dan Demonstrasi	Satpol PP Melakukan Pengamanan	Terlayani
18	SEKOLAH	15 JULI 2024	Anak Sekolah yang Berada di luar saat jam belajar di Kecamatan Sei Rampah	Menghunjuk personil Satpol PP kabupaten serdang bedagai melakukan penertiban dan penindakan terhadap anak sekolah yang berada di luar saat jam belajar di Kec.Sei Rampah	Terlayani
19	DIVISI ADVOKASI HUKUM&HAK ASASI MANUSIA SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA	1 AGUSTUS 2024	Aksi dugaan penyelewengan Bansos Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Kepala Desa Penggalangan kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai	Satpol PP Melakukan Pengamanan	Terlayani
20	SEKOLAH	04 SEPTEMBER 2024	Anak Sekolah yang Berada di luar saat jam belajar di Kecamatan Sei Rampah	Menghunjuk personil Satpol PP kabupaten serdang bedagai melakukan penertiban dan penindakan terhadap	Terlayani

NO	Nama Pelapor	Tanggal Pengaduan	Jenis pengaduan	Tindak Lanjut	Status Pengaduan
				anak sekolah yang berada di luar saat jam belajar di Kec.Sei Rampah	
21	SEKOLAH	21 OKTOBER 2024	Anak Sekolah yang Berada di luar saat jam belajar di Kecamatan Sei Rampah	Menghunjuk personil Satpol PP kabupaten serdang bedagai melakukan penertiban dan penindakan terhadap anak sekolah yang berada di luar saat jam belajar di Kec.Sei Rampah	Terlayani
22	MAHASISWA DAN RAKYAT	28 OKTOBER 2024	Menyuarakan dan memperjuangkan hak rakyat, pengusutan tuntas dugaan Korupsi pada pembangunan Alun-Alun Serdang Bedagai	Satpol PP Melakukan Pengamanan	Terlayani
					Total 22

Sumber Data : Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk mendapatkan capaian kinerja Persentase Penangana Gangguan Trantibum yang ditangani, dilakukan perbandingan antara Jumlah Pengaduan Gangguan Trantibum dengan Jumlah Penanganan pada Gangguan Trantibum tersebut yang kemudian untuk memperoleh persentasenya, dikalikan dengan 100%. Sehingga rumus yang dipakai adalah sebagai berikut :

Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani =

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Juml Pengaduan Gangguan Trantibum}}{\text{Jum Penanganan Gangguan Trantibum}} \times 100\% \\
 & = \frac{22}{22} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Maka untuk pencapaian indikator Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani, diperoleh hasil 100%.

b. Persentase Perda/ Perkada yang ditegakkan

Pada Indikator kedua, data diperoleh dari Bidang Penegakan Perda yang mendokumentasikan jumlah pelanggaran perda dan perkara yang memiliki sanksi di Kabupaten Serdang Bedagai. Ketercapaian inidkator ini dilakukan dengan melakukan rekapituasi jumlah perda dan perkara yang memiliki sanksi serta jumlah perda perkara yang ditegakkan. Adapun jumlah perda yang ditegakkan selama tahun 2024 meliputi :

Tabel 3. 3
Rekapitulasi Penegakan Perda Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2024

No	Jenis Perda/Perkada	Tanggal Kegiatan
1.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	18-19 Januari 2024
2.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	23 Januari 2024
3.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	29-30 Januari 2024
4.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	1-2 Februari 2024
5.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	06-07 Februari 2024
6.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	1 Maret 2024
7.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	19-20 Maret 2024
8.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	25 Maret 2024
9.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	27 Maret 2024
10.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	23 April 2024
11.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	15 Mei 2024

No	Jenis Perda/Perkada	Tanggal Kegiatan
12.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	13 Juni 2024
13.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	11-12 Juli 2024
14.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	15 Juli 2024
15.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	23-24 Juli 2024
16.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	6-8 Agustus 2024
17.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	28 Agustus 2024
18.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	3 September 2024
19.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	30-31 Oktober 2024
20.	Perda No. 26 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum	06 Desember 2024
21.	Perda No. 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai	24 Desember 2024
22.	Perda No. 4 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah	27 Maret 2024
23.	Perda No. 14 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung	23 Juli 2024
24.	Perda No. 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	29 April 2024
25.	Perda No. 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	16 Juli 2024
26.	Perda No. 8 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	30 April 2024
27.	Perda No. 8 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	22 Juli 2024
28.	Perda No. 1 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	19 November 2024
29.	Perda No. 8 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik	25 April 2024

No	Jenis Perda/Perkada	Tanggal Kegiatan
30.	Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jalan	19 Juli 2024
Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan ada 9, pada 30 kegiatan		

Sumber : Bidang Penegakan Perda Satpol PP

Untuk memperoleh realisasi kinerja pada indikator ini, diperoleh dengan membandingkan jumlah perda/ perkada yang ditegakkan dibagi dengan jumlah perda yang memiliki sanksi di kabupaten. Kemudian untuk mendapatkan persentasenya, hasil perbandingan dikalikan dengan 100%. Berikut adalah Perda Perkada yang memiliki sanksi yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 3. 4
Rekapitulasi Perda/ Perkada di Kabupaten Serdang Bedagai
Pada Tahun 2024

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Keterangan
1	Perda tentang Ketertiban Umum	Nomor 26 Tahun 2008	Masih Berlaku
2	Perda tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai	Nomor 9 Tahun 2008	Masih Berlaku
3	Perda tentang Pajak Daerah	Nomor 4 Tahun 2021	Masih Berlaku
4	Perda tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW 2013-2023	Nomor 1 Tahun 2021 Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013	Masih Berlaku
5	Perda tentang Bangunan Gedung	Nomor 14 Tahun 2013	Masih Berlaku
6	Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok	Nomor 10 Tahun 2013	Masih Berlaku
7	Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Nomor 1 Tahun 2015	Masih Berlaku
8	Perda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Nomor 8 Tahun 2016	Masih Berlaku
9	Perda tentang Pelayanan Publik	Nomor 8 Tahun 2018	Masih Berlaku
10	Perda Tentang Penyelenggaraan Jalan	Nomor 9 Tahun 2018	Masih Berlaku
Total			10

Sumber : Bidang Penegakan Perda Satpol PP

Sehingga dengan rincian tersebut dapat diperoleh hasil kinerja Persentase Penegakan Perda/ Perkada erhitungan untuk mengukur kegiatan yaitu dengan rumus;

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Perda/ Perkada yang ditegakkan} &= \frac{\text{Jumlah Perda yang ditangani}}{\text{Jumlah Perda yang memiliki sanksi}} \times 100\% \\
 &= \frac{9}{10} \times 100\% = 90\%
 \end{aligned}$$

Sehingga dengan rumus diatas, diperoleh hasil capaian untuk Persentase Perda/ Perkada yang ditegakkan pada tahun 2024, sebesar 90 % dari target pada tahun 2024.

Berdasarkan perhitungan komponen rumus kinerja diatas maka untuk mendapatkan hasil capaian kinerja dari Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum =

$$\frac{\text{Persentase Penanganan Gangguan Trantibum} + \text{Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan}}{2}$$

$$\frac{(100\% + 90\%)}{2}$$

$$\frac{(190\%)}{2} = 95\%$$

3.1.2.2 Pengukuran Sasaran Strategis II

	Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
---	--

Pada Sasaran Kedua yakni, Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, data diperoleh dari Bidang Kebakaran dan Penyelamatan. Terdapat 1 (satu) indikator yang menjadi alat ukur pencapaian kinerja sasaran, yaitu penghitungan jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh petugas pemadam kebakaran dalam rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran dan penghitungan jumlah kejadian non kebakaran yang ditangani.

Pada indikator ini diperoleh jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 45 kejadian, dimana seluruh kejadian kebakaran ditangani hingga tuntas oleh petugas pemadam kebakaran. Rincian kejadian kebakaran dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3. 5
Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Di Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2024

No	Nama Korban Kebakaran	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Jark Tempuh	Waktu meneri ma laporan	Waktu tiba dilokasi kejadian	Respon time	Keterangan
1	Ilham Sidik Pratono	Desa Pabatu I Dolok Merawan	Selasa 13 Februari 2024	2 Unit Rumah	12 KM	23.00 WIB	23.15 WIB	15 Menit	dokumentasi
2	Hj. Rasiman	Sei Parit	Minggu 18 Februari 2024	1 Unit Rumah	10 KM	01.35 WIB	01.50 WIB	15 Menit	dokumentasi
3	Irfan	Perumahan Thamrin Firdaus	Rabu, 21 Februari 2024	Lahan kosong	10 KM	11.00 WIB	11.13 WIB	13 Menit	dokumentasi
4	Ayu	Jl Pandan dsn II Kec T. Syah bandar	Rabu, 21 Februari 2024	1 Unit Rumah	15 KM	12.35 WIB	12.50 WIB	15 Menit	dokumentasi
5	Ema Yunita	Suka Jadi dsn II Kec Perbaungan	Jumat, 01 Maret 2024	1 Unit Rumah	8 km	21.00 WIB	21.14 WIB	14 Menit	dokumentasi
6	Marus Lumban Raja	Dsn II Desa Pardomuan Kec dolok masihul	Kamis, 07 Maret 2024	1 Unit Rumah	10 km	21.00 WIB	21.15 WIB	15 Menit	dokumentasi
7	naqsabandiyah	Desa Kota Pari Kec Pantai Cermin	Selasa, 19 maret 2024	Lahan milik perkumpula n tarekat naqsabandiyah	14 km	11.30 WIB	11.40 WIB	10 Menit	dokumentasi
8	Darliyanto	Ling III Tualang Kec Perbaungan	Minggu, 24 Maret 2024	I unit rumah	10 km	04.00 WIB	04.10 WIB	15 Menit	dokumentasi

No	Nama Korban Kebakaran	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Jark Tempuh	Waktu menerima laporan	Waktu tiba dilokasi kejadian	Respon time	Keterangan
9	Fauziah Bintang	Sialang buah kec teluk mengkudu	Selasa, 02 April 2024	1 unit toko pakaian 1 unit bengkel	10 km	14.00 WIB	14.15 WIB	15 Menit	dokumentasi
10	Amir hamzah	Firdaus kec sei rampah	Rabu, 03 April 2024	1 unit rumah	13 km	20.30 WIB	20.45 WIB	15 Menit	dokumentasi
11	Mariyat	Bengkel kec Perbaungan	Senin, 08 April 2024	1 unit rumah	5 km	13.00 WIB	13.15 WIB	15 Menit	dokumentasi
12	Misdi	Suka Damai Kec Sei Bamban	Senin 08 April 2024	1 Unit rumah	10 km	20.00 WIB	20.12 WIB	12 Menit	dokumentasi
13	Agung Sucipto	Citaman jernih kec perbaungan	Selasa 09 April 2024	1 unit gudang getah pinus	11 km	21.00 WIB	21.14 WIB	14 Menit	dokumentasi
14	Rusli	Pekan tj beringin kec tj beringin	Minggu 14 April 2024	2 Unit Rumah	12 km	12.30 WIB	12.45 WIB	15 Menit	dokumentasi
15	Razino	Gang jambu kp mangging simpang 3 pekan kec perbaungan	Senin 06 Mei 2024	1 unit rumah	9 km	18.00 WIB	18.10 WIB	10 Menit	dokumentasi
16	Ahmad Habib Lubis	Jl stasiun KA Simpang 3 pekan kec perbaungan	Selasa 07 Mei 2024	1 unit rumah	10 km	13.00 WIB	13.14 WIB	15 Menit	dokumentasi
17	Sabar Simanjuntak (kepsek)	Dsn I desa sei buluh kec sei bamban	Selasa 07 Mei 2024	1 ruangan lap computer SMP N 3 Sei bamban	8 km	14.20 WIB	14.35 WIB	15 Menit	dokumentasi
18	yayasan pesantren PPQ Al Washliyah	Dsn II desa firdaus Kec Sei Rampah	Rabu 08 Mei 2024	Perkebunan yayasan pesantren	12 km	14.50 WIB	15.05 WIB	15 Menit	dokumentasi

No	Nama Korban Kebakaran	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Jark Tempuh	Waktu meneri ma laporan	Waktu tiba dilokasi kejadian	Respon time	Keterangan
				PPQ Al Washliyah					
19	Rospita br Sitorus Juandi Sitinjak	Pematang Cermai Kec Tanjung Beringin	Senin, 13 Mei 2024	2 unit rumah	13 km	16.15 WIB	16.30 WIB	15 Menit	dokumentasi
20	Saripah	Pondok melati kebun PTPN II kec Pegajahan	Jumat 24 Mei 2024	1 unit rumah	10 km	18.35 WIB	18.50 WIB	15 Menit	dokumentasi
21	paulina	Pantai cermin kanan kec pantai cermin	Sabtu 1 Juni 2024	1 unit rumah	9 km	16.00 WIB	16.15 WIB	15 Menit	dokumentasi
22	Ponidi	Paya lombang pasar 2 dsn 4 kec t. tinggi	Selasa 4 Juni 2024	1 unit rumah	12 km	04.30 WIB	04.45 WIB	15 Menit	dokumentasi
23	Erwinsyah	Pasar Serong Kec Sei Bamban	Sabtu 22 Juni 2024	PT Utama Karya	11 km	15.30 WIB	15.45 WIB	15 Menit	dokumentasi
24	Lukman Azhari Lubis	Banjaran godang dsn I Kec Kotarih	Kamis 4 juli 2024	2 ruko 1 unit mobil	13 km	04.00 WIB	04.15 WIB	15 Menit	dokumentasi
25	M. rusli	Batang terap kec perbaungan	Selasa, 09 Juli 2024	1 unit rumah	12 km	19.30 WIB	19.45 WIB	15 Menit	dokumentasi
26	Rizky	Dolok Merawan Kec T. Tinggi	Sabtu 13 Juli 2024	Pabrik Gunung Para II	14 km	09.30 WIB	09.45 WIB	15 Menit	dokumentasi
27	Budi	Sialang Buah Kec Teluk Mengkudu	Jumat 19Juli 2024	Lahan Kosong Pohon Kelapa Permukima n	12 km	22.30 WIB	22.44 WIB	14 Menit	dokumentasi

No	Nama Korban Kebakaran	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Jark Tempuh	Waktu meneri ma laporan	Waktu tiba dilokasi kejadian	Respon time	Keterangan
28	-	Jl. Lintas sungai ular desa pasiran kec perbaungan	Minggu 21 Juli 2024	Pohon di pinggiir jalan	9 km	21.00 WIB	21.15 WIB	15 Menit	dokumentasi
29	-	Dsn 5 desa pecan tanjung beringin	Sabtu, 27 Juli 2024	pohon	8 km	14.00 WIB	14.15 WIB	15 Menit	dokumentasi
30	Robin	Jl. KA Ahmad Dahlan Kec T. Tinggi	Minggu 11 Agustus 2024	Toko roti gembira	12 km	09.50 WIB	10.05 WIB	15 Menit	dokumentasi
31	Samsudin sinaga	Bakaran batu dsn 3 kelapa tinggi kec sei bamban	Kamis 05 September 2024	1 unit rumah	11 km	12.20 WIB	12.35 WIB	15 Menit	dokumentasi
32	Jhon Martin Purba	Pulo tagor kec serba jadi	Kamis 05 September 2024	Kandang ayam	14 km	01.00 WIB	01.15 WIB	15 Menit	dokumentasi
33	arya	Jl lintas sumut kec perbaungan	Minggu 08 Septembet 2024	Toko Baju Modis	13 km	20.00 WIB	20.15 WIB	15 Menit	dokumentasi
34	Nur arifin	Citaman jernih kec perbaungan	Minggu 15 september 2024	1 unit rumah	7 km	04.00 WIB	04.15 WIB	15 Menit	dokumentasi
35	siswanto	Pecan tanjung beringin	Selasa 17 September 2024	1 unit warung	9 km	16.30 WIB	16.44 WIB	14 Menit	dokumentasi
36	-	Desa Firdaus Kec Sei Rampah	Rabu 18 September 2024	Perumahan Dinas Kejaksaan Negeri	12 km	10.30 WIB	10.45 WIB	15 Menit	dokumentasi
37	Riyanto	Ling III KP lalang Pkn kec Dolok masihul	Sabtu, 21 September 2024	1 unit rumah	13 km	05.55 WIB	06.10 WIB	15 Menit	dokumentasi

No	Nama Korban Kebakaran	Alamat	Tanggal Kejadian	Jenis Kejadian	Jark Tempuh	Waktu menerima laporan	Waktu tiba dilokasi kejadian	Respon time	Keterangan
38	Painem	3 kp krompol kec t. tinggi	Minggu, 22 September 2024	1 unit rumah	15 km	15.00 WIB	15.15 WIB	15 Menit	dokumentasi
39	Ariadi Sinulingga	Desa Sei Buluh Kec Teluk Mengkudu	Sabtu 12 oktober 2024	1 unit rumah	8 km	22.40 WIB	22.55 WIB	15 Menit	dokumentasi
40	Alian	Melati jl johor kec perbaungan	Jumat 18 oktober 2024	1 unit ruko grosir	10 km	00.00 WIB	01.15 WIB	15 Menit	dokumentasi
41	Budi agus	Ling 5 kec dolok masihul	Jumat 25 oktober 2024	1 unit rumah	9 km	16.20 WIB	16.35 WIB	15 Menit	dokumentasi
42	-	Kec Sei Rampah	Rabu, 30 Oktober 2024	Kantor KUA Sei Rampah	10 km	02.30 WIB	02.45 WIB	15 Menit	dokumentasi
43	Gomgom siringo-ringo	Sei bamban	Senin 16 desember 2024	1 unit rumah	12 km	19.51 WIB	20.06 WIB	15 Menit	dokumentasi
44	Andika cania	Kota galuh kec perbaungan	Rabu 25 desember 2024	1 unit rumah usaha Kasur, bantal, kursi	14 km	22.52 WIB	23.07 WIB	15 Menit	dokumentasi
45	Bahrum	Dsn 4 tanjung rejo kec dolok masihul	Jumat 27 desember 2024	1 unit rumah usaha produksi tahu	13 km	00.05 WIB	00.20 WIB	15 Menit	Dokumentasi
Jumlah Kejadian Kebakaran Di Kabupaten/ Kota								45 Kejadian kebakaran	

Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP

Berdasarkan data tersebut, menggunakan rumus berikut diperoleh persentase capaian kinerja untuk Indikator Persentase Pelayanan Penyelamatan Korban Kebakaran.

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pelayanan Penyelamatan} \\ \text{Korban Kebakaran} &= \frac{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran yang ditangani}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kejadian Kebakaran}} \times 100\% \\ &= \frac{45}{45} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Kemudian dalam pelayanannya Satpol PP urusan pemadam kebakaran juga melakukan penyelamatan non kebakaran

Tabel 3. 6
Rekapitulasi Penyelamatan non Kebakaran
Tahun 2024

No	Tanggal	Jenis Evakuasi	Nama Pelapor	Alamat
1	31-Jan-24	Ular King Kobra 3 M	Winda	Desa Paya Pinang
2	21-Feb-24	Ular	Jeni Eka Putri	Jl Pahlawan ling II
3	1-Mar-24	Evakuasi Cincin	Siswa SMKN 1 Teluk Mengkudu	Desa Sialang Buah
4	8-Mar-24	Ular	Aris Panjaitan	Dsn IV Sei Rampah
5	14-Mar-24	Sarang Tawon	SD 106224	Desa Kerapuh
6	26-Mar-24	Sarang tawon	SD 102658	Dolok Masihul
7	26-Mar-24	Sarang tawon	SD 102058	Pekan Dolok Masihul
8	19-Apr-24	Sarang tawon	Aula Sd 106258	Pekan Dolok Masihul
9	30-Apr-24	Ular kobra	Murti Anugerah	Café teras Sei Rampah
10	01-Mei-24	Sarang tawon	Nira	Desa silau rakyat
11	6 Mei 2024	Sarang tawon vespa	Sujiman	Bukit Cermin Hilir dsn IV
12	12 Juni 24	Ular	M. Alwan Hilmi	Pekan Dolok Masihul

No	Tanggal	Jenis Evakuasi	Nama Pelapor	Alamat
13	13 Juni 24	Kucing	Arifin	perbaungan
14	10 Juli 24	Sarang Tawon	Rian Carlos Manik	Dsn VII Desa Firdaus
15	11 Juli 24	cincin	siska	Pasar senin rampah kiri
16	23 Juli 24	ular	pairan	Dsn I Suka Tani
17	27 Juli 24	cincin	daffa	Kp dsn V Sei Bamban
18	7 agustus 24	Sarang tawon	PT. Aqua Farm	Desa Naga Kisar
19	5-Sep-24	Sarang tawon	Eva	Firdaus dsn VII
20	16-Sep-24	Sarang Tawon	Feri Anggara	Dolok Segala
21	18-Sep-24	Ular	Carlos Samuel	Paya pasir
22	31-Sep-24	ular	Monang panjaitan	Pangkalan II Seirampah
23	3-Okt-24	Panjat tower	bembeng	Paya Lombang
24	7-Okt-24	ular	Hidayat	Firdaus dsn III
25	9-Okt-24	ular	M. Ikbal	Sukadamai dsn VII
26	9-Okt-24	cincin	Mayang Marsela	Sei Buluh
27	2-Nov-24	Sarang Tawon	Alvian Purba	Ling V Tanah Lapang Dolok Masihul
28	3-Des-24	Penyumbatan Gorong-gorong	-	Firdaus Sei Rampah
29	11-Des-24	Sarang Tawon	Danu	Mesjid dsn I Lubuk Bayas
30	17-Des-24	Burung hantu	Faridah	Jl Kutilang Emas gg Tempe desa citaman Jernih
Total				30 Kejadian

Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP

Berdasarkan data tersebut, menggunakan rumus berikut diperoleh persentase capaian kinerja untuk Indikator Persentase Pelayanan Non Kebakaran.

Persentase Pelayanan Non Kebakaran

$$= \frac{\text{Jumlah Layanan non Kebakaran yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan atas Layanan non Kebakaran Kebakaran}} \times 100\% \\ = \frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$$

Dengan kedua indikator tersebut maka diperoleh akumulasi atas Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dimana indikatornya adalah Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran dengan rumus :

$$\left(\frac{\text{Persentase layanan pemadaman kebakaran di kabupaten} + \text{Persentase pelayanan Non kebakaran}}{2} \right) / \\ = \frac{100\% + 100\%}{2} \\ = 100\%$$

3.1.2.3 Pengukuran Tujuan Strategis

Dalam upaya pencapaian sasaran perangkat daerah, terdapat tujuan yang hendak dicapai. Diawal telah diuraikan bahwa dengan 2 Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja, ada 1 Tujuan utama yang ingin dicapai yakni Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan 1 Tujuan penunjang yang berkaitan pencapaian Birokrasi yang akuntabel. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dibuatlah suatu indikator yakni Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum. Rumus yang dipakai yaitu

$$\text{Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum} = 50 \% \text{ Persentase Kualitas Trantbum} + 50 \% \text{ Persentase Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum} &= 50 \% \times (95\%) + 50\% \times (100\%) \\ &= 0,475 + 0,5 \\ &= 0.975 \end{aligned}$$

Sementara untuk perhitungan pada tujuan penunjang yakni Nilai SAKIP, diperoleh dari nilai LHE Inspektorat pada tahun 2024. Adapun hasil yang diperoleh yakni :

Tabel 3. 7
Capaian Nilai Sakip Satpol PP
Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	23.92	23.25
2	Penguluran Kinerja	30	20.93	21.50
3	Pelaporan Kinerja	15	13.43	11.24
4	Evaluasi akuntabilitas internal kinerja	25	21.00	17.00
	Nilai Hasil Evaluasi		79.28	72.99
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber : Inspektorat Serdang Bedagai

Dari hasil LHE Inspektorat pada tahun 2024, diperoleh nilai sakip Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai mencapai nilai BB dengan nilai 72.99. Dari target capaian yang diperoleh, maka capaian telah tercapai, hanya saja jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan perubahan penilaian pada LHE Sakip sehingga komponen penilaian mengalami perubahan.

Berdasarkan dari hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja baik pada komponen indikator Tujuan dan Sasaran sebagai mana telah diuraikan pada tabel-tabel sebelumnya, maka capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
I.	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat daalm rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum	Poin	0.98	0.975	99.4%	Sangat Tinggi	Satpol PP
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	95	95	100	Sangat Tinggi	Bidang Trantibum dan Gakda
2.	Peningkatan Pelayanan pemadam kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran Dan Non Kebakaran	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Bidang Damkar
II	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip perangkat daerah	Poin	72.99	72.99	100	Sangat Tinggi	Satpol PP

Dari hasil capaian di tahun 2024, maka terdapat 3 (tiga) capaian yang sesuai target (=100) dan 1 (satu) belum mencapai target (<100). namun ketidak tercapaian satu indikator tersebut bukan berarti capaian rendah, dalam rentang capaian masih dikategorikan sangat tinggi. Oleh sebab itu dapat disampaikan bahwa keempat indikator memiliki kategori sangat tinggi. Berdasarkan capaian tersebut menggambarkan kinerja yang memuaskan mengingat capaian kinerja yang dikategorikan tercapai sesuai dengan yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2024.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 9
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat daalm rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum	NA	90%	0.975	0.98	0.975	99.4%
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	95	95	95	100
2.	Peningkatan Pelayanan pemadam kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran Dan Non Kebakaran	100%	100%	100	100	100	100
II	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip perangkat daerah	B	B	79.28	72.99	72.99	100

Dari Perbandingan Capaian Kinerja pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwasanya indikator kinerja :

1. Pencapaian indikator tujuan belum dapat melebihi tahun sebelumnya, namun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja sudah sesuai dengan pencapaian tahun sebelumnya.
2. Keseluruhan target sasaran tercapai sebagaimana yang diharapkan, dan dapat ditingkatkan pada penetapan target capaian data tahun berikutnya.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 10
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisa si Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategi s	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
I.	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat daalm rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum	0.975	1	97
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95	100	95
2.	Peningkatan Pelayanan pemadam kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran Dan Non Kebakaran	100	100	100
II	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip perangkat daerah	72.99	78	93

Berdasarkan tabel diatas diperoleh terdapat 1 inidkator yang telah tercapai yakni Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran Dan Non Kebakaran, diharapkan pencapaian kinerja dapat terus dipertahankan.

Untuk 3 indikator lainnya, nilai diperbandingkan memang belum tercapai, namun target pencapaian memiliki selisih yang tidak jauh dan diperkirakan dapat dicapai diakhir tahun renstra. Dengan konsistensi dan kerjasama dalam pencapaian target maka diharapkan di akhir tahun renstra target-target capaian dapat diraih.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Secara langsung dalam standar nasional tidak ada pencapaian kinerja yang memiliki defenisi yang sama, namun terdapat kemiripan tujuan dari pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal). Dimana SPM Trantibum linmas dalam sub urusan ketentraman dan ketertiban umum memiliki indikator Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100% setiap tahunnya.

Tabel 3. 11
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/
Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
I	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat daalm rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum	0.975	NA	NA
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95	100	95
2.	Peningkatan Pelayanan Pemadam	Persentase pelayanan pemadam kebakaran dan non kebakaran	100	100	100

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Kebakaran dan Penyelamatan				
II	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip perangkat daerah	72.99	70.75	102.8

Bila dibandingkan dalam pencapaian target nasional, maka terdapat 2 indikator pelayanan masih berada dibawah target nasional dan 1 target tujuan yang berada diatas target provinsi, yaitu indikator pancapaian nilai sakip. Dalam pencapaian indikator layanan berkaitan dengan pencapaian standar pelayanan minimal, target yang ditetapkan nasional adalah pelayanan 100% setiap tahunnya, sementara secara kinerja pelayanan, satpol pp belum dapat menargetkan dan merealisasikan target 100%. Hal ini dikarenakan SDA dan SDM di Kabupaten Serdang Bedagai yang masih jauh dari standar. Namun demikian dalam hal Perencanaan Kinerja, pada tahun mendatang sebagaimana tercantum didalam rencana strategis satuan polisi pamong praja tahun 2021-2026 target capaian pada indikator tersebut telah disesuaikan dengan target nasional. Sehingga diharapkan pada tahun akhir renstra, capaian tersebut dapat sama-sama dicapai.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 12
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

N o	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Targ et	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat daalm rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum	0.98	0.975	99.4	Komitmen dalam pencapaian target pelayanan sehingga target kinerja dapat dilaksanakan dengan baik	Melaksanakan kegiatan secara swadaya dan swadana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95	95	100	Kepemimpinan yang baik serta kemauan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan	Koordinasi dengan Kasi Trantib dan Instansi vertikal di kecamatan dalam pelaksanaan cipta kondisi trantibum yang kondusif
2	Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase pelayanan pemadam kebakaran dan non kebakaran	100	100	100	Kesiapsiagaan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Melakukan monitoring pelaksanaan tugas Bekerjasama dengan tim damkar Kawasan perbatasan
II	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip perangkat daerah	72.99	72.99	100	Kerjasama dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam pencapaian sakip	Melakukan perbaikan atas dokumen yang ada

Meskipun sesuai dengan target yang diharapkan, namun dalam pelaksanaannya pencapaian target tidak luput dari beberapa permasalahan yakni:

- Minimnya sarana dan prasarana kendaraan Patroli baik itu untuk roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) termasuk juga alat berat untuk melakukan penertiban.

- Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi pelanggaran perda dan perkara serta perubahannya.
- Luasnya daerah kabupaten dibandingkan dengan pos / WMK yang hanya ada 3, yakni di perbaungan, sei bamban dan dolok masihul.
- Sarana prasarana masih dibawah SPM damkar.

Solusi atas permasalahan tersebut diatas yaitu :

- Memberikan himbauan kepada masyarakat dan pengusaha untuk mengurus izin-izin yang menyangkut perda dan perkara.
- Melakukan koordinasi dengan OPD terkait agar penyelesaian penegakan perda dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan aturan.
- Masih diperlukan pelatihan guna meningkatkan kemampuan personil dalam menghadapi kejadian kebakaran yang terjadi.
- Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana serta mengusulkan untuk penambahan peralatan dan mobil damkar yang memadai dan berupaya menambah pos dan mobil damkar.
- Memberikan himbauan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran.
- Melakukan pengkaderan terhadap relawan damkar di desa/ kelurahan untuk membantu pelayanan pemadaman kebakaran.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/ biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Input Target}}{\text{Input Aktual}} \geq 1$$

- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.

- Jika input yang ditargetkan berbanding input actual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 13
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif	0.98	0.975	99.4	9.726.870.546	9.339.252.579	96.01	1.03
1	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95	95	100	643.193.000	325.369.000	50.43	1.98
2	Persentase pelayanan pemadam kebakaran dan non kebakaran	100	100	100	181.129.500	168.338.400	92.94	1.07
II	Nilai Sakip perangkat daerah	72.99	72.99	100	8.900.548.046	8.845.545.179	99.38	1.00

Dari keempat indikator yang hendak dicapai, menunjukkan angka lebih dari 1 (satu), yang dapat disimpulkan bahwa efisiensi telah tercapai, dimana dengan pagu yang telah dianggarkan, perangkat daerah berupaya sebaik mungkin untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian, efisiensi anggaran ditahun mendatang dapat dilakukan untuk

menfokuskan pada pencapaian target, bukan sekedar mengurangi besaran pagu anggaran. Dengan demikian efisiensi yang dilakukan lebih dapat bermanfaat dalam menunjang kinerja yang masih perlu ditingkatkan lagi.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya pencapaian target-target kinerja yang telah diperjanjikan, diperlukan kegiatan yang dapat dilakukan oleh perangkat daerah. kegiatan-kegiatan tersebut tertuang dalam program dan kegiatan hingga sub kegiatan sehingga diperoleh capaian kinerja yang baik. Banyaknya program dan kegiatan yang dilaksanakan, tentunya berpengaruh kepada ketercapaian target-target kinerja.

Berdasarkan tabel dibawah ini, maka pemilihan program dan kegiatan yang diambil dalam menunjang kinerja telah tepat, dapat dilihat dari kesinambungan capaian kinerja pada indikator kinerja dan capaian program kegiatan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dianalisis melalui penjelasan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 14
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum	0.975					
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100	Menunjang	Tercapai
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	90	Menunjang	Tercapai
2	Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase pelayanan pemadam kebakaran dan non kebakaran	100	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan pemadam kebakaran	100	Menunjang	Tercapai
					Persentase pelayanan non kebakaran	100	Menunjang	Tercapai
					Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan	30	Menunjang	Tercapai
II	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip perangkat daerah	72.99	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	72.99	Menunjang	Tercapai

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 15
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.900.548.046	8.845.545.179	99,38%
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.742.000	6.742.000	100,00%
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.595.000	1.595.000	100,00%
I.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.147.000	5.147.000	100,00%
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.230.925.070	3.202.962.154	99,13%
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.159.285.070	3.132.242.154	99,14%
I.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71.640.000	70.720.000	98,72%
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.079.576	102.891.025	99,82%
I.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.801.450	12.801.450	100,00%
I.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.418.266	16.418.266	100,00%
I.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.182.000	10.182.000	100,00%
I.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.836.360	1.685.400	91,78%
I.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.163.500	13.163.500	100,00%
I.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	0,00%
I.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.678.000	48.640.409	99,92%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.000.000	4.000.000	100,00%
I.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000	4.000.000	100,00%
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.838.900.000	4.835.700.000	99,93%
I.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	100,00%
I.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.500.000	5.000.000	76,92%
I.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.826.400.000	4.824.700.000	99,96%
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	716.901.400	693.250.000	96,70%
I.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.685.000	73.825.000	96,27%
I.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	523.346.400	503.055.000	96,12%
I.6.3	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	645.193.000	325.369.000	50,43%
I.6.4	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	536.805.000	218.205.000	40,65%
II	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	9.000.000	9.000.000	100,00%
II.1	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.500.000	9.000.000	58,06%
II.1.1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	7.525.000	7.150.000	95,02%
II.1.2	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini	465.505.000	154.205.000	33,13%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			
II.1.3	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	37.950.000	37.525.000	98,88%
II.1.4	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	1.325.000	1.325.000	100,00%
II.1.5	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	108.388.000	107.164.000	98,87%
II.1.6	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24.620.000	24.455.000	99,33%
II.2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	61.508.000	60.524.000	98,40%
II.2.1	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	22.260.000	22.185.000	99,66%
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	181.129.500	168.338.400	92,94%
III.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	166.549.500	153.758.400	92,32%
III.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.560.000	7.560.000	100,00%
III.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.700.000	17.700.000	100,00%
III.1.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	9.000.000	9.000.000	100,00%
III.1.4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00%
III.1.5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4.500.000	4.500.000	100,00%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
III.1.6	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	6.054.000	1.310.000	21,64%
III.1.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	113.977.500	105.995.000	93,00%
III.1.8	Penyelenggaraan Kerjasama dan koordinasi antar Daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	7.758.000	7.693.400	99,17%
III.2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	9.000.000	9.000.000	100,00%
III.2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	9.000.000	9.000.000	100,00%
III.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	5.580.000	5.580.000	100,00%
III.3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.830.000	1.830.000	100,00%
III.3.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	3.750.000	3.750.000	100,00%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Keuangan Satpol PP

Dapat kami jelaskan bahwasanya pada tahun anggaran 2024 Satpol PP memiliki 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.9.726.870.546,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.339.252.579,- (96,01%). Adapun realisasi tidak tercapai 100% dikarenakan terdapat kegiatan yang tidak dapat dikerjakan salah satunya yaitu Dana Hibah yang diberikan kepada pihak ketiga. Pada dasarnya pencapaian realisasi anggaran secara garis besar sudah sesuai dengan target yang direncanakan, hanya saja perlunya sinkronisasi dalam penganggaran dalam menetapkan pagu anggaran ditahun mendatang, terkait dengan pemberian hibah yang dianggarkan di P-APBD yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024. Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) tujuan strategis sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (tiga) indikator tersebut, secara umum sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pada tahun 2024 tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp.9.726.870.546 yang terealisasi sebesar 9.339.252.579,- telah mewujudkan capaian kinerja Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka menunjang Sapta Dambaan (Tujuh Dambaan) yang telah ditetapkan pada Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang

telah digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai adalah 96% dari anggaran yang direncanakan.

Adapun pencapaian kinerja yang dilakukan telah terlebih dahulu didiskusikan melalui Dialog Kinerja yang kemudian diaplikasikan melalui e-kinerja setiap individu sehingga pencapaian kinerja dapat berkesinambungan mulai dari level staf hingga level pimpinan. Melihat capaian yang diperoleh berdasarkan pencapaian sasaran yang ada, dimana tiga indikator masing-masing capaiannya 100% dan di tahun 2024 maka diperlukan usaha keras untuk mempertahankan kinerja agar capaian yang sudah baik dan tercapai di tahun 2024 dapat dipertahankan sampai tahun 2026.

Berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaporkan dalam kinerja ini, menunjukkan komitmen dan tanggung jawab pimpinan dan pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian target-target kinerja. Sehingga kedepannya terdapat perbaikan dan penyesuaian Perencanaan kinerja, sehingga mempengaruhi budaya kinerja organisasi yang berorientasi pada capaian hasil kinerja. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan pada kinerja di tahun mendatang yakni:

- Melakukan monitoring pada pencapaian kinerja setiap triwulan agar laporan dapat dipertanggungjawabkan.
- Memaksimalkan kinerja layanan agar dapat mencapai target-target yang diperjanjikan
- Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan agar pencapaian kinerja tidak terhambat.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Serdang Bedagai.

Hal ini juga mengandung arti bahwa kedepannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai perlu mengoptimalkan kinerja

setiap tahunnya agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus juga menjaga keselarasan terhadap target-target nasional dalam hal pelayanan dasar dibidang trantibum dan kebakaran seperti yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sehingga diharapkan perbaikan-perbaikan yang berarti yang dapat dimulai dari perencanaan hingga evaluasi guna mewujudkan kinerja perangkat daerah yang mendukung kemajuan pembangunan daerah.

Sei Rampah,

2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



MUHAMMAD WAHYUDHI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD WAHYUDHI, S.STP, M.Si
 Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : DARMA WIJAYA
 Jabatan : Bupati Serdang Bedagai

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sei Rampah, Januari 2024

BUPATI SERDANG BEDAGAI



DARMA WIJAYA

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



MUHAMMAD WAHYUDHI, S.STP, M.Si
NIP. 19770212 199511 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatkan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum	0,98
1.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95%
2.	Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran dan non Kebakaran	100%
3.	Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,99

Program	Anggaran	Ket
1. Program Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.373.969.197	APBD
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 557.743.545	APBD
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 134.957.500	APBD
Total Anggaran	Rp. 8.066.672.242	

Sei Rampah, Januari 2024

Bupati Serdang Bedagai,



DARMA WIJAYA

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Serdang Bedagai,**



MUHAMMAD WAHYUDHI, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770212 199511 1 001

DIALOG KINERJA

Dialog Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Periode Hari Rabu, Tanggal 03 Bulan Januari Tahun 2024									
Fokus Tema: Kesiapan dalam pelaksanaan tugas tahun 2024	Waktu dan Tempat Pelaksanaan: 1. Hari/Tanggal : Rabu , 03 Januari 2024 2. Waktu : 09.00 s/d 12.00 3. Tempat : Ruang Rapat Kasatpol PP								
Isu Strategis: 1. Pelaksanaan tugas dalam menyambut HUT Sergai	Partisipan: 1. Pimpinan : Kasatpol PP 2. Peserta : 1. Kabid Trantibum 2. Kabid Penegak Perda 3. Kabid Pemadam dan Penyelamatan 4. Kasubbag Perencanaan, Keu dan Akuntabilitas 5. Kasubbag Umum dan Perlengkapan								
Output: Pembagian tugas dalam pelaksanaan tupoksi dalam kegiatan 2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Agenda</th> <th>Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Pengecekan Kesiapan Personil</td> <td>: 09.00 s/d 10.00.</td> </tr> <tr> <td>2. Pembagian Tugas dan pemetaan pelaksanaan kegiatan</td> <td>: 10.00 s/d 11.00</td> </tr> <tr> <td>3. Isu lainnya terkait pengelolaan kinerja</td> <td>: 11.00 s/d 12.00.</td> </tr> </tbody> </table>	Agenda	Waktu	1. Pengecekan Kesiapan Personil	: 09.00 s/d 10.00.	2. Pembagian Tugas dan pemetaan pelaksanaan kegiatan	: 10.00 s/d 11.00	3. Isu lainnya terkait pengelolaan kinerja	: 11.00 s/d 12.00.
Agenda	Waktu								
1. Pengecekan Kesiapan Personil	: 09.00 s/d 10.00.								
2. Pembagian Tugas dan pemetaan pelaksanaan kegiatan	: 10.00 s/d 11.00								
3. Isu lainnya terkait pengelolaan kinerja	: 11.00 s/d 12.00.								

Agenda	: Pembagian Tugas dan Pemetaan Pelaksanaan Kegiatan 2024
Hari, Tgl, Waktu	: Rabu 03 Januari 2024
Tempat	: Ruang Rapat Kasatpol PP
Pimpinan Rapat	: Kasatpol PP Kab. Serdang Bedagai
Peserta Rapat	: 1. Kabid Trantibum 2. Kabid Pencak Perda 3. Kabid Pemadam dan Penyelamatan 4. Kasubbag Perencanaan, Keu dan Akuntabilitas 5. Kasubbag Umum dan Perlengkapan
I. Pendahuluan	Kegiatan dibuka oleh Kasatpol PP dan dihadiri oleh para Kabid dan Kasubbag Perencanaan, Keu dan Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai guna membahas kegiatan yang akan dihadapi pada tahun 2024.
II. Pembahasan (berisi tentang penyampaian pendapat, usul, persentase, kritik atau tanggapan peserta rapat)	Kegiatan yang harus segera dilaksanakan dalam waktu dekat yaitu perayaan HUT Sergai yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan. Dalam Urusan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum, Satpol PP memegang peranan penting dalam menciptakan suasana yang kondusif pasca dan pra kegiatan. Oleh karenanya pembagian tugas dan pemetaan dilakukan agar setiap anggota Satpol PP dapat melaksanakan kegiatannya dengan maksimal.
III. Kesimpulan	SPT akan segera disusun dan disosialisasikan kepada seluruh personil dan kondisi sarana prasarana harus dalam kondisi stand by.
IV. Tindak lanjut atau rencana aksi	Adapun rencana aksi yang dapat dipersiapkan kedepannya yaitu : a. Kesiapan personil dalam melaksanakan pelayanan b. Kesiapan sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas

Sei Rampah, 03 Januari 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Serdang Bedagai



MUHAMMAD KAHWUDHI, S.STP, M.Si
NIP. 19770212 199511 1 001



LHE INPEKTORAT 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
INSPEKTORAT

Jalan Negara No.300 Telepon 0621-441532 Fax.0621-441532
 SEI RAMPAH – SUMATERA UTARA

20695

Sei Rambah, 31 Mei 2024

Nomor : 18.10 / 000 / 110 / 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024
 Kepada Yth : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 di - Tempat

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

1

	dilakukan dengan menggunakan LKE manual, akan tetapi belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi), namun hasilnya telah menggambarkan kinerja internal di perangkat daerah;	
2	Rekomendasi telah ditindaklanjuti, namun masih terdapat rekomendasi penggunaan aplikasi yang belum dapat ditindaklanjuti karena keterbatasan anggaran.	Belum ditindaklanjuti

E. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 sebagai berikut:

No	IKU	satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Keselamatan dan Keteruban Umum	point	0.9	0.975	108.33
2	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keteruban Umum	%	90	95	105.5
3	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran Dan Non Kebakaran	%	100	100	100

F. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan nilai 72,99 dengan predikat BB, Hal ini menunjukkan **"Nilai tersebut memberikan gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit, baik itu unit kerja utama, maupun berbasis teknologi informasi, serta dilakukan sampai ke level eselon 3/Koordinator"**.

Rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			Tahun 2024	Tahun 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	23,25	23,92
2	Pengukuran Kinerja	30	21,50	20,93
3	Pelaporan Kinerja	15	11,24	13,43
4	Evaluasi Akuntabilitas Internal Kinerja	25	17,00	21,00
	Nilai Hasil Evaluasi		72,99	79,28
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan hasil evaluasi sebagai berikut :

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perencanaan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut hasil evaluasi per sub komponen :

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja:

4

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target 2024
1	Meningkatkan Ketertarikan, Ketertarikan Umum dalam Rangka Meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif	Indeks Keamanan dan Ketertarikan Umum	0.9
1	Meningkatnya Kualitas Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	90
2	Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan non Kebakaran	100

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai telah menyusun perencanaan kinerja tahun 2024 dengan mempedomani dokumen RPJMD Perubahan dan Renstra Perubahan tahun 2021-2026, namun ada kelemahan diantaranya;

1. Indikator sasaran "Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran dan non Kebakaran" yang dipilih belum berpengaruh untuk pencapaian indikator tujuan;
2. Masih terdapat target kinerja dibawah capaian tahun sebelumnya;

2. Pengukuran Kinerja

Perjanjian Kinerja 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target 2024
1	Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	95%
2	Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan non Kebakaran	100%
3	Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengukuran kinerja dengan memanfaatkan e-SAKIP namun masih terdapat kelemahan diantaranya :

1. Belum dimaksimalkan e-SAKIP untuk menginput aktivitas kinerja perangkat daerah;

2. Tujuan dan indikator tujuan yang direncanakan belum menjadi bagian dari kinerja yang diperjanjikan tahun 2024;
3. Target kinerja predikat BB akan lebih terukur jika dibuat nilai setara dengan predikat BB seperti 72,00;
3. Pelaporan Kinerja;
Laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja telah disusun, namun pencapaian kinerja yang diperoleh tahun sebelumnya tidak dipertimbangkan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang dimana terdapat target indikator kinerja yang lebih kecil dari tahun sebelumnya, sedangkan target indikator tujuannya masih sama.
4. Evaluasi Akuntabilitas Internal Kinerja
Evaluasi kinerja internal telah dilakukan namun masih terdapat kekurangan diantaranya :
1) Memanfaatkan e-SAKIP untuk monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah; dan
2) Rekomendasi evaluasi tahun 2023 belum seluruhnya ditindaklanjuti;

G. Rekomendasi

Terhadap kelemahan - kelemahan yang ditemukan, di rekomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Kinerja
 1. Menetapkan indikator sasaran yang mampu mendukung tercapainya indikator sasaran;
 2. Menetapkan target perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya;
- 2) Pengukuran Kinerja
 1. Memaksimalkan e- SAKIP dalam aktivitas pencapaian kinerja perangkat daerah;
 2. Memasukan Indikator Tujuan menjadi bagian yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024;
 3. Menetapkan target kinerja yang terukur dan berorientasi hasil;
- 3) Pelaporan Kinerja
 1. Memanfaatkan laporan kinerja sebagai pertimbangan kinerja dimasa mendatang;

TINDAK LANJUT ATAS LHE

**Rencana Tindak Lanjut Perbaikan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024
Sesuai Rekomendasi Evaluator Inspektorat**

Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Monitoring SAKIP TA 2024

No.	Rekomendasi Inspektorat	Rencana Tindakan Perbaikan/Pencegahan	Jadwal	Status/ Progres Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menetapkan indikator sasaran yang mampu mengukur indikator sasaran	Indikator sasaran telah dilengkapi dengan definisi operasional, formula sehingga diperoleh pemahaman tentang pencapaian sasaran melalui indikator yang ditetapkan	Tahun 2024	Sudah dikerjakan
2.	Menetapkan target perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya	Target Perjanjian Kinerja 2024 telah menyesuaikan hasil capaian tahun 2023	Tahun 2024	Sudah dilaksanakan
1.	Memaksimalkan e-SAKIP dalam aktivitas pencapaian kinerja perangkat daerah dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024	Pengisian aplikasi e-SAKIP akan dilakukan setiap bulan	Tahun 2024	Sedang dilakukan
2.	Memasukkan Indikator Tujuan menjadi bagian yang diperjanjikan	Indikator Tujuan akan dimasukkan kedalam perubahan perjanjian kinerja	Tahun 2024	Sudah diajukan perbaikan
3.	Menetapkan target kinerja yang terukur dan berorientasi hasil	Target kinerja menunjukkan kondisi yang diharapkan dan metode pencapaiannya telah dioperasionalkan sehingga dapat dipahami tujuan pemilihan indikator, pengumpulan datanya dan pengolahan data kinerjanya.	Tahun 2024	Sudah disusun
1.	Memanfaatkan laporan kinerja sebagai pertimbangan kinerja dimasa mendatang	Laporan kinerja telah menjadi pertimbangan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja ditahun berjalan, terlihat dengan perubahan target kinerja yang menyesuaikan hasil capaian tahun sebelumnya	Tahun 2024	Sudah dilaksanakan

No.	Rekomendasi Inspektorat	Rencana Tindakan Perbaikan/Pencegahan	Jadwal	Status/ Progres Penyelesaian
1.	Memanfaatkan e-SAKIP untuk monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Aplikasi e-SAKIP telah dimaksimalkan baik penginputan target dan realisasi per bulannya yang dilengkapi dengan faktor-faktor pendorong dan penghambat	Tahun 2024	Sedang dilaksanakan
2.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Seluruh Rekomendasi telah ditindaklanjuti	Tahun 2024	Sudah dilaksanakan
3.	Mendorong penggunaan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penyusunan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Tahun 2024	Sudah diusulkan

Sei Rampah, 2024
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI


 MUHAMMAD WAHYUDHI, S.STP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19770212 199511 1 001

RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2021-2026

Tuj uan Ka bup ate n	Tu ju an Pe ra ng kat Da er ah	Sas ara n Per ang kat	Indi kato r Sasa ran	Kode	Program dan Kegiatan	S u m b er Da na	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikat or Kinerja	Sa tu an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026		
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
								T a r get		Rp	T a r get	Rp	T a r get	Rp	T a r get	Rp	T a r get	Rp	T a r get	Rp	T a r get	Rp	T a r get	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
Misi 3, Tujuan ke 7. Sasaran 7																								
Me nin gka tny a Ikli m Inv est asi yan g ko nd usif	Nil ai In ve st asi	Me nin gka tny a Ket ent ram an, Ket erti ban Um um dal am ran gka me nin gka tkan iklim inv est asi yang	1	05	01		PROGR M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA		Nilai SAKIP Perangk at Daerah	Poin	B B	8.149 .044. 698	B B	8.697 .252. 027	B B	8.08 7.72 7.73 6	7 3	9.413 .067. 957	7 5	10.18 8.115 .021	7 8	13.1 92.8 59.7 83	A	57.7 28.0 67.2 23
			1	05	01	1 .0 1	Perencan aan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah		Tersedianya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengang garan dan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah Pengang garan dan Evaluasi Kinerja Peranak	Persen	100 0 0	2.750 .000	100 0 0	10.00 0.000	100 0 0	2.00 0.00 0	100 0 0	45.00 0.000	100 0 0	45.00 0.000	100 0 0	45.0 00.0 00	600

		kon dus if									at Daerah																			
In de ks Ke a m an an da n Ke te rti ba n U m u m				1	0	0	1	0	Penyu sunan Doku men Perenc anaan Perang kat Daera h	D A U	Tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokume n Perenca naan Perangk at Daerah	Do ku m en	1	0	2.750. 000	1	0	10.00 0.000	1	1.000 .000	2	7.000. 000	2	7.000. 000	2	7.000 .000	2	7	34.7 50.0 00
				1	0	0	1	0	Koordi nasi dan Penyu sunan Doku men RKA- SKPD	D A U		Jumlah Dokume n RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi Penyusu nan Dokume n RKA- SKPD	Do ku m en	0	-	0	-	0	-	1	10.00 0.000	1	10.00 0.000	1	10.00 0.000	3	30.0 00.0 00			
				1	0	0	1	0	Koordi nasi dan Penyu sunan Doku men Perub ahan RKA- SKPD	D A U		Jumlah Dokume n RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi Penyusu nan Dokume n RKA- SKPD	Do ku m en	0	-	0	-	0	-	1	8.000. 000	1	8.000. 000	1	8.000 .000	3	24.0 00.0 00			

LAPORAN KINERJA 2024

				1	0	0	1	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	-	0	-	0	-	3	18.000.000	3	18.000.000	3	18.000.000	9	54.000.000
				1	0	0	1	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU	Tersedianya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	-	0	-	1	1.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	13	7.000.000
				1	0	0	1	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan	Perse	100	3.020.164.639	100	2.870.106.495	100	2.834.289.615	100	2.913.467.957	100	2.983.305.021	100	3.054.909.783	600	17.676.243.511
				1	0	0	1	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	DAU	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	Orang/B	22	2.975.874.639	21	2.835.946.495	20	2.725.319.615	21	2.793.467.957	22	2.863.305.021	23	2.934.909.783	129	17.128.823.511

						ngan ASN			dan Tunjang an ASN	ul an															
				105	01	1002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DAU	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	44.290.000	1	34.160.000	1	108.970.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	6	547.420.000
				105	01	105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang disediakan	Persen	100	164.910.000	0	-	0	-	0	100	100	364.250.000	100	364.250.000	300	893.410.000
				105	01	1005	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	DAU		Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Paket	235	164.910.000	0	-	0	-	0	236	236	364.250.000	236	364.250.000	707	893.410.000
				105	01	106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	Persen	100	144.425.900	100	201.849.419	100	58.870.538	100	608.800.000	100	608.760.000	100	616.900.000	600	2.239.605.857

						1	0 5	0 1	1 .0 6	0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	D A U	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	26.73 0.000	1	2.956. 787	1	9.904 .000	1	50.00 0.000	1	50.00 0.000	1	50.00 0.000	6	189. 590. 787
						1	0 5	0 1	1 .0 6	0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	D A U	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	58.00 0.000	1	25.60 0.000	1	12.99 7.628	1	80.00 0.000	1	80.00 0.000	1	80.00 0.000	6	336. 597. 628
						1	0 5	0 1	1 .0 6	0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	D A U	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	11.33 7.900	1	9.500. 000	1	7.125 .160	1	60.00 0.000	1	60.00 0.000	1	60.00 0.000	6	207. 963. 060
						1	0 5	0 1	1 .0 6	0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	D A U	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.240. 000	1	10.62 4.000	1	1.870 .000	1	30.00 0.000	1	29.76 0.000	1	30.00 0.000	6	105. 494. 000
						1	0 5	0 1	1 .0 6	0 0 5	Penyediaan Barang Cetak an	D A U	Tersedianya Cetakan dan Pengandaan kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggan	Paket	1	22.07 0.000	1	24.64 0.000	1	8.353 .750	1	39.80 0.000	1	40.00 0.000	1	46.90 0.000	6	181. 763. 750

[illegible]

						Jabatan			Jabatan yang Disediakan																		
				1	0	0	1	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	Tersedianya Kendaraan Dinas Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	-	0	-	0	-	0	-	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000		
				1	0	0	1	0	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	0	-	0	-	0	-	1	150.000.000	1	180.000.000	2	330.000.000		
				1	0	0	1	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	-	0	-	0	-	1	180.000.000	1	190.000.000	2	370.000.000		
				1	0	0	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DAU	Tersedianya sarana dan prasaran Gedung kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	22.054.800	1	49.855.000	0	-	4	200.000.000	3	180.000.000	5	300.000.000	14	751.909.800

					105	01	107	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	-	0	-	0		3	150.000.000	3	180.000.000	3	185.000.000	9	515.000.000	
					105	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase	100	4.240.717.267	100	4.645.557.451	100	4.819.642.583	100	4.386.800.000	100	4.386.800.000	100	4.386.800.000	600	26.866.317.301
					105	01	108	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	6.500.000	1	12.000.000	1	2.250.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	6	56.750.000
					105	01	108	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	26.717.267	1	114.957.451	1	2.992.583	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	294.667.301

					1 0 5	0 1	1 0 8	0 0 4	Penye diaan Jasa Pelaya nan Umum Kantor	D A U	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Pelayan an Umum Kantor yang Disedia kan	La po ra n	1 2	4.207. 500.0 00	1 2	4.518. 600.0 00	1 2	4.814 .400. 000	1 2	4.324. 800.0 00	1 2	4.324. 800.0 00	1 2	4.324 .800. 000	7 2	26.5 14.9 00.0 00
					1 5	0 1	1 0 9	1 0 9	Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	<i>Persent ase Pemelih araan Barang Milik Daerah</i>	<i>Pe rs en</i>	1 0 0	554.0 22.09 2	1 0 0	919.8 83.66 2	1 0 0	372. 925. 000	1 0 0	1.109 .000. 000	1 0 0	1.110 .000. 000	1 0 0	1.37 0.00 0.00 0	6 0 0	5.43 5.83 0.75 4
					1 5	0 1	1 0 9	0 0 1	Penye diaan Jasa Pemeli haraa n, Biaya Pemeli haraa n dan Pajak Kenda raan Perora ngan Dinas atau Kenda raan Dinas Jabata n	D A U	Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendara an Peroran gan Dinas atau Kendara an Dinas Jabatan yang Dipeliha ra dan Dibayar kan Pajakny a	u ni t	1	39.71 9.965	1	38.40 0.000	1	38.42 0.000	1	39.00 0.000	1	40.00 0.000	1	40.00 0.000	6	235. 539. 965

					1	0	0	1	0	Penye- diaan Jasa Pemeli- haraan, Biaya Pemeli- haraan, Pajak, dan Perizin- an Kenda- raan Dinas Opera- sional atau Lapang- an	D A U	Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas lapangan	Jumlah Kendara- an Dinas Operasi- onal atau Lapang- an yang Dipeliha- ra dan Dibayar- kan Pajak dan Perizina- nnya	u ni t	1 0	423.4 50.60 7	1 1	812.9 99.66 2	9	323.7 20.00 0	1 2	800.0 00.00 0	1 2	900.0 00.00 0	1 2	1.000 .000. 000	6 6	4.26 0.17 0.26 9
					1	0	0	1	0	Pemeli- haraan/ Rehabili- tasi Gedun- g Kantor dan Bangun- an Lainnya	D A U	Tersedianya pemeliharaan Gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangun- an Lainnya yang Dipeliha- ra/Dire- habilita- si	u ni t	1	67.78 1.020	1	29.00 0.000	0	-	1	180.0 00.00 0	1	100.0 00.00 0	1	150.0 00.00 0	5	526. 781. 020
					1	0	0	1	0	Pemeli- haraan/ Rehabili- tasi Sarana dan Prasar- ana Gedun- g Kantor atau Bangun- an	D A U	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasara- na Gedung Kantor atau Bangun- an Lainnya yang Dipeliha- ra/Dire-	u ni t	4 0	23.07 0.500	5 0	39.48 4.000	3 2	10.78 5.000	4 0	90.00 0.000	5 0	70.00 0.000	5 0	180.0 00.00 0	2 6 2	413. 339. 500

[illegible]

[illegible]

[illegible]

					1	0	0	2	0	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	D A U	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Satpol dan Satlinmas	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Or an g	1 2 0	60.32 3.000	3 0	13.10 0.000	0	-	5 0	240.0 00.00 0	5 0	240.0 00.00 0	5 0	360.0 00.00 0	3 0 0	913. 423. 000
					1	0	0	2	0	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertaman	D A U	Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dalam pelaksanaan trantibum linmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	D ok u m en	0	-	0	-	0	-	4	80.00 0.000	4	80.00 0.000	4	80.00 0.000	1 2	240. 000. 000

LAPORAN KINERJA 2024

				1	0	0	2	0	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Satpol dan Satlinmas	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang	0	-	0	-	0	-	2	34.000.000	2	42.000.000	3	54.000.000	7	130.000.000
				1	0	0	2	0	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Terbentuknya Tim Penilai angka Kredit dan sekretariat pengelolaan jabatan fungsional Pol pp	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui	Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	8.000.000	1	8.000.000	0	-	2	16.000.000

[illegible]

					105	02	201	014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		Terlaksananya Kapasitas SDM Satpol Pp dan Satlinmas melalui Dikat teknis	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	-	0	-	-	0	-	5	54.000.000	5	54.000.000	10	108.000.000	
					105	02	201	017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	DAU	Tersedianya dokumen Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	0	-	0	-	0	1	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000	3	25.500.000	
					105	02	202		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan		Meningkatkan pengawasan dan operasi penegakan pelanggaran perda/ perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		75	106.945.000	82	129.328.000	85	58.707.935	90	736.000.000	95	736.000.000	98	736.000.000	525	2.502.980.935

[illegible]

				1	0	0	2	0	Penga	D	Tersediannya sarana	Jumlah	u	0		0		0	-	1	30.00	1	45.00	1	60.00	3	135.
				5		2	0	0	daan	A	dan prasaranan	Sarana	ni							0	0.000	0	0.000	2	0.000	2	000.
							2	6	dan	U	penegakan perda/	Prasara	t														000
									Pemeli		perkada	na															
									haraa			Penegak															
									n			an															
									Saran			an															
									a dan			Pratur															
									Prasar			an															
									ana			Daerah															
									Peneg																		
									akan																		
									Peratu																		
									ran																		
									Daera																		
									h																		
									(Ruan																		
									g																		
									Pemeri																		
									ksana																		
									an,																		
									Gelar																		
									Perkar																		
									a, dan																		
									Ruang																		
									Penyi																		
									mpana																		
									n																		
									Baran																		
									g																		
									Bukti)																		
				1	0	0	2	0	Penyel	D	Terlaksananya	Jumlah	La	0		0		0	-	1	9.000.	1	9.000.	1	9.000	3	27.0
				5		2	0	0	idikan	A	penyidikan	Laporan	po								000		000		.000		00.0
							0	0	terhad	U	pelanggaran perda/	Hasil	ra														00
							2	7	ap		perkada	Penyelid	n														
									dugaa			ikan															
									n			atas															
									Pelang			Dugaan															
									garan			Pelangg															
									Peratu			aran															
									ran			Peratur															
									Daera			an															
									h dan			Daerah															
									Peratu			dan															
									ran			Peratur															
									Kepala			an															
									Daera			Kepala															
									h			Daerah															

LAPORAN KINERJA 2024

					1	0	0	2	0	Duku ngan Pelaks anaan Sidang atas Pelang garan Peratu ran Daera h	D A U	Tersedianya dukungan pelaksanaan sidang pelanggaran perda/ perkada	Jumlah Perkara yang Dapat Disidan gkan	La po ra n	0	-	0	-	0	-	0	-	1	8.000. 000	1	1.000 .000	2	9.00 0.00 0
					1	0	0	2	0	Pembe rkasa n Admin istrasi Penyidi kan oleh PPNS Peneg ak Peratu ran Daera h	D A U	Tersedianya administrasi penyidikan PPNS	Jumlah Dokume n Pember kasan Hasil Penyidi kan atas Pelangg aran Perda	D ok u m en	0	-	0	-	0	-	0	-	1	3.000. 000	1	3.000 .000	2	6.00 0.00 0
					1	0	0	2	0	Sosiali sasi Peneg akan Peratu ran Daera h dan Peratu ran Bupati /Wali Kota	D A U	Terlaksananya sosialisasi penegakan perda/ perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksa naan Sosialis asi Penegak an Perda/P erkada kepada Masyar akat/Ke lompok Masyar akat/Pe laku Usaha	La po ra n	0	-	1	19.71 5.000	1	13.97 3.000	3	180.0 00.00 0	3	180.0 00.00 0	3	180.0 00.00 0	1 1	573. 688. 000

LAPORAN KINERJA 2024

						1	0	0	2	0	Penga wasan atas Kepat uhan terhad ap Pelaks anaan Peratu ran Daera h dan Peratu ran Bupati /Wali Kota	D A U	Terlaksananya pengawasan atas kepatuhan terhadap perda/ perkara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksa naan Pengaw asan yang Dilakuk an Terhada p Kepatu han Terhada p Pelaksa naan Peratur an Daerah dan Peratur an Bupati/ Wali Kota	La po ra n	1 2	19.80 0.000	1 2	31.30 0.000	1 2	18.00 0.000	1 0 0	216.0 00.00 0	1 0 0	216.0 00.00 0	1 0 0	216.0 00.00 0	3 3 6	717. 100. 000
						1	0	0	2	0	Penan ganan atas Pelang garan Peratu ran Daera h dan Peratu ran Bupati /Wali Kota	D A U	Terlaksananya penanganan atas pelanggaran perda/ perkada	Jumlah Laporan Pelaksa naan Penang anan Atas Pelangg aran Peratur an Daerah dan Peratur an Gubern ur yang Dapat Ditanga ni Sesuai SOP	La po ra n	3	87.14 5.000	3	78.31 3.000	2	26.73 4.935	4	340.0 00.00 0	4	340.0 00.00 0	4	340.0 00.00 0	2 0	1.21 2.19 2.93 5

					1 5	0 2	0 3	2 0		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	D A U	Meningkatkan pembinaan penyidik pegawai megeri Sipil (ppns) kabupaten	Persentase Pembinaan PPNS yang dilaksanakan	Pe rs en	0	-	0	-	0	-	1 0 0	38.00 0.000	1 0 0	248.0 00.00 0	1 0 0	176. 000. 000	3 0 0	462. 000. 000
					1 5	0 2	0 3	2 0	0 0 2	Pembentukan Sekretariat PPNS	D A U	Terlaksananya pembentukan sekretariat ppnd	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	D ok u m en	0	-	0	-	0	-	0		1	40.00 0.000	1	40.00 0.000	2	80.0 00.0 00
					1 5	0 2	0 3	2 0	0 0 3	Kerja Sama Antar Lemba ga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	D A U	Terlaksananya kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan pernegakan perda/ perkada	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan	D ok u m en	0	-	0	-	0	-	0		1	80.00 0.000	1	8.000 .000	2	88.0 00.0 00
					1 5	0 2	0 3	2 0	0 0 4	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	D A U	Terlaksananya pembentukan PPNs Penegak perda	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peratur	La po ra n	0	-	0	-	0	-	0		1	30.00 0.000	1	30.00 0.000	2	60.0 00.0 00

[illegible]

				1	0	0	3	0	Pembe		Terlaksananya	Jumlah	Ke	0	0	0	1	50.00	1	60.00	1	80.00	3	190.
				5	2	0	5	0	rdayaa		pemberdayaan	Satgas	gi	-	-	-	1	0.000	1	0.000	1	0.000	000	000
									n		satgas linmas	di	at											
									Satgas		kabupaten	Kabupa	an											
									Linmas		di	ten/Kot	a											
									Kabup		satgas linmas	a	Yang											
									aten/		di	Diberda	an											
									Kota		kabupaten	yakan												
				1	0	0	3	0	Pembe		Terlaksananya	Jumlah	Ke	0	0	0	1	50.00	1	60.00	1	80.00	3	190.
				5	2	0	5	0	rdayaa		pemberdayaan	Satgas	gi	-	-	-	1	0.000	1	0.000	1	0.000	000	000
									n		satgas Trantibum di	Ketenter												
									Satgas		kabupaten	aman												
									Ketent			dan												
									rama			Ketertib												
									n dan			an												
									Umum			di												
									di			Kabupa												
									Kabup			ten/Kot												
									aten/			a	Yang											
									Kota			Diberda												
									Kota			yakan												
		Pen	Pers	1	0	0			PROGRA			Persentase	Pe	1	1	1	1	816.4	1	1.057	1	1.12	6	3.33
		ing	enta	5	4				M			pelayan	rs	0	0	0	286.1	0	.507	0	0.65	0	5.26	
		kat	se						PENCEG			an	en	0	0	0	75.01	0	540	0	8.29	0	1.30	
		an	Pela						AHAN,			pemada					8				4	2		
		Pel	yan						PENANG			an												
		ayan	an						GULANG			kebakar												
		nan	Pem						AN,			an												
		Pe	ada						PENYELA			an												
		ma	m						MATAN			kebakaran												
		da	Keb						KEBAKA			non												
		m	akar						RAN DAN			kebakaran												
		Ke	an						PENYELA			an												
		bak	dan						MATAN			an												
		ara	Non						NON															
		n	Keb						KEBAKA					0	0	2	0		4	0	5	1		
		dan	akar						RAN			Persentase	Pe	0		0			0	0	0	4		
		Pen	an									pembetulan	rs											
		yel										relawan	en											
		am										pemada												
		ata										m												
		n										kebakaran												
												di												
												desa/ke												
												lurahan												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LAPORAN KINERJA 2024

					1	0	0	2	0	Pembe ntuka n dan Pembi naan Relaw an Pemad am Kebak aran	D A U	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap tahunnya	Jumlah Desa/K eluraha n yang Terbent uk dan Terbina Relawan Pemada m Kebakar an pada Lingkup Sistem Ketahan an Kebakar an Lingkun gan (SKKL) Setiap Tahunnya	De sa / Ke lu ra ha n	0	-	0	-	1	4.370 .000	1	102.0 00.00 0	1	120.0 00.00 0	4	8	120.0 00.00 0	9	9	346. 370. 000
					1	0	0	2	0	Duku ngan Pembe rdayaa n Masya rakat/ Relaw an Pemad am Kebak aran Melalu i Penye diaan Saran a dan PraSar ana	D A U	Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokume n yang Memuat Jumlah SKKL Desa/K eluraha n yang Telah Tersedia Dukung an Sapras Damkar	D ok u m en	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.0 00.00 0	1	100.0 00.00 0	2		200. 000. 000	

					1 5	0 4	0 5	2 5	0 5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	PADA	Terlaksananya Operasi pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase Pelayanan terhadap kondisi membahayakan manusia		0	-	0	-	0	-	1 0 0	46.00 0.000	1 0 0	194.0 00.000	1 0 0	249. 000.000	3 0 0	489. 000.000
					1 5	0 4	0 5	2 5	0 1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	DAU	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	0	-	0	-	0	-	3	12.00 0.000	5	15.00 0.000	5	15.00 0.000	1 3	42.0 00.000
					1 5	0 4	0 5	2 5	0 5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	DAU	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	3 2	145.0 00.000	3 2	200.0 00.000	6 4	345. 000.000

								ngan terhad ap Kondis i Memb ahaya kan Manus ia/Pen yelam atan dan Evaku asi		Sesuai Standar Teknis	gan Terhada p Kondisi Memba hayaka n Manusi a/Penye lamatan dan Evakua si Sesuai dengan Standar Teknis															
				105	04	2005	004	Pembi naan Aparat ur Pencar ian dan Pertolo ngan terhad ap Kondis i Memb ahaya kan Manus ia/Pen yelam atan dan Evaku asi	D A U	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelama tan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembin aan Aparatu r Pencari an dan Pertolon gan Terhada p Kondisi Memba hayaka n Manusi a/Penye lamatan dan Evakua si yang Sah dan Legal	La po ra n	0	-	0	-	0	4	34.00 0.000	4	34.00 0.000	4	34.00 0.000	12	102.000.000	
Total														8.506 .367. 698		9.501 .832. 993		8.24 8.52 8.17 1		13.36 8.990 .907		14.78 7.122 .561		18.1 31.0 18.0 77	0	72.5 43.8 60.4 08